

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulrahman, 1994. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hlm 25.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hlm 185-186.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV. Nuansa Aulia, hlm 69.
- I. Cade A.B Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibid*, hlm 72.
- Imam Sudiyat, 1999. *Asas-asas Hukum Adat*, Liberti, Jogjakarta.
- Kusuma Pudjosewojo, 1961. *Pengantar Pelajaran Tata Hukum Indonesia*.
Hlm 59
- Oloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mita Kebijakan Tanah Indonesia, hlm 215.
- R. Soepomo, 1959. *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*, PT. Pustaka Rakyat, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

Sejarah Perkembangan Masuknya Misionaris Di Tanah Papua Oleh Uskup Agung Merauke 2002.

Sejarah Pembebasan Irian Barat (Papua) 1963 Dan Terbentuknya Sejarah Kota Merauke 1902 Oleh Pemda Kabupaten Merauke 2002 Pada Peringatan 100 Tahun Jadi Kota Merauke.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32

Sofyansitelaw.blogspot.co.id, diakses pada Senin, 14 Agustus 2017, pukul 09.48

Soeryo Wiguidipuro, 1995. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, FT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Sukamta, 2002. *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Surjono Sukamto dan Soeleman B Taneko, 1981. *Hukum Adat Indonesia*, Karunia Esa, Jakarta.

Wignjodipoero, Seorojo, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, hlm 19.

-----,, 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini, Dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Makassar.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2009.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 11 Tahun 1989, tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kampung Maupun di Kelurahan di Seleruh Indonesia.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 43 ayat (3)

Undang-Undang Pokok Agraria 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan Pasal 5

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28i ayat (3)

Internet :

www.tardha57.com/2015/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html?m=1, diakses pada Sabtu, 2 September 2017, pukul 10.00

www.hukumonline.com, diakses pada Sabtu, 2 September 2017, pukul 10.00

Jurnal :

Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, “Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian”, *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11, No. 2 Tahun 2014.

Bambang Eko Mulyono, “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Peningkatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Di Buat Oleh Notaris”, *Jurnal Independent*, Volume 2, No. 61 Tahun 2011.

Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, No. 1 Tahun 2011.

Hayatul Ismi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 Tahun 2014.

Jois Betania Minggu, Dr. Rachmad Safa'at SH, Msi, Dr. Istislam SH, M.Hum, "Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat", Volume 10, No. 5 Tahun 2012.

Lili Somantri, S.Pd.M.Si, "Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua", *Mimbar Hukum*, Volume 12, No. 2 Tahun 2014.

Muazzin, "Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 2 Tahun 2014.

Ulfia Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria di Hubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 Tahun 2011.

Urip Santoso, "Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta", *Jurnal Hukum ProJustitia*, Volume 28, No. 2 Tahun 2010.

Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konsitusi Negara Pasca Amandemen", *Mimbar Hukum*, Volume 22, No. 3 Tahun 2010.